

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh:

Suherman

Direktur Mutiara Bangsa Group, Tangerang

(email: [suhermanupi@yahoo.com](mailto:suhermanupi@yahoo.com))

---

## ABSTRAK

Keberhasilan pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari kebijakan, sistem pengelolaan program serta penjaminan mutu internal. Pada praktiknya, kebijakan tidak sesuai dengan identifikasi masalah. Penjaminan mutu pendidikan karakter sulit diterapkan akibat lemahnya kecukupan syarat seperti anggaran serta SDM. Tujuan penelitian 1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pendidikan Karakter, 2) mengembangkan model hipotetik sistem penjaminan mutu internal dalam pendidikan karakter. Metode penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. Sumber data menggunakan *purposive sampling* dan *snowball technique*. Analisis data menggunakan *constructionist analysis*. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pendidikan disusun berdasarkan visi serta tujuan sekolah dengan karakteristik dan program berbeda. SD Tzu Chi menekankan pada kemandirian dan kebermaknaan individu, SD Mutiara Bangsa fokus pada toleransi, SDN 07 Jelambar fokus pada nilai religius. Masalah utama dalam penjaminan mutu adalah anggaran, belum optimalnya riset dan pengembangan praktik, sistem informasi, serta SDM guru .

**Kata kunci: Kebijakan, Program, Pendidikan Karakter, Penjaminan Mutu Internal**

## ABSTRACT

*The success of character education can not be separated from the policy, management systems and internal quality assurance program. In practice, the policy is not appropriate with the identification problem. Character education quality assurance difficult to implement. Because budgetary requirements HR. Aims of this study 1) describe and analyze the implementation of character education policy, 2) develop a hypothetical model of internal quality assurance system in character education. Descriptive research method qualitative study case. Data sources are purposive sampling and snowball technique. Analysis of data used constructionist analysis. The results showed education policy is based on the vision and goals of the school with characteristics and different programs. SD Tzu Chi emphasis on self-reliance and individual significance, SD MB focus on tolerance, SDN 07 Jelambar focus on religious values. The main problem in quality assurance is the budget, not optimal research and development practices, information systems, and human resource.*

**Keywords: Policies, Programs, Character Education, Internal Quality Assurance**

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan karakter yang berorientasi pada mutu yang terjamin cukup kompleks. Sekolah mengalami hambatan baik di level sistem maupun implementasi kebijakan. Masalah yang umum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter adalah lemahnya sistem penjaminan mutu internal pendidikan karakter. Persyaratan umum seperti identifikasi proses secara terperinci dari kebijakan kepala sekolah, perencanaan, program dan implementasi maupun kendala program belum dijadikan sebagai kebutuhan untuk menjamin mutu dalam pendidikan karakter. Interaksi dari proses tersebut tidak didokumentasikan. Hal ini disebabkan lemahnya penetapan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa kebijakan, perencanaan, implementasi serta hambatan akan efektif dengan pengendalian serta peninjauan ulang untuk perbaikan berkelanjutan.

Sebagian besar sekolah tidak mampu memenuhi persyaratan umum, dokumentasi, dan manual mutu yang mencakup ruang lingkup dalam sistem penjaminan mutu pendidikan karakter secara khusus. Prosedur-prosedur tertulis serta deskripsi dari sekuens interaksi kebijakan, perencanaan, program dan implementasi serta hambatan tidak didokumentasikan. Penetapan dan pemeliharaan prosedur tertulis dalam penyelenggaraan pendidikan karakter tidak menjadi kebutuhan utama sekolah. Hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki jaminan ketersediaan sumber daya dan informasi guna mendukung operasionalisasi penjaminan mutu dalam pendidikan karakter. Tindakan-tindakan maupun revisi pada kegiatan pendidikan karakter belum terdokumentasikan dan tidak ditinjau kembali bagaimana revisi yang telah dilakukan tersebut dioperasionalkan. Pernyataan tertulis

mengenai kebijakan mutu pada setiap kegiatan di sekolah belum sepenuhnya didukung oleh pengendalian program serta implementasinya. Sebagian besar sekolah belum memiliki struktur internal yang menjamin mutu dalam implementasi pendidikan karakter. Struktur organisasi yang ada belum menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab anggota organisasi dalam penjaminan mutu pendidikan karakter.

Keberhasilan pendidikan karakter terletak pada mutu penyelenggaraannya artinya bahwa sistem penjaminan mutu pada pendidikan karakter merupakan sebuah kebutuhan utama mengingat persoalan karakter yang cukup memprihatinkan dan belum terselesaikan hingga saat ini. Hasil penelitian Klaus dan Kriegsman (Megawangi, 2004, hlm.6) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kredibilitas yang rendah dalam masalah karakter. Hasil penelitian tersebut dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini. Kualitas pendidikan karakter memiliki implikasi praktis terhadap kehidupan masyarakat. Megawangi (2004, hlm. 1) menegaskan bahwa: "Nilai-nilai moral yang ditanamkan akan membentuk karakter (akhlak mulia) yang merupakan fondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera". Menurut Budimansyah (2010, hlm.2) bahwa: "Walaupun sudah diselenggarakan melalui berbagai upaya, pembangunan karakter Bangsa belum terlaksana secara optimal dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter baik (*good character*) warga negara belum cukup signifikan".

Hasil observasi dan pengalaman peneliti sebagai pendidik menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki struktur organisasi yang menempatkan salah satu anggota organisasi sebagai penanggung jawab dalam pendidikan karakter atau *internal quality system*. Belum ada pihak yang secara formal 1) menyusun perencanaan sesuai dengan hasil identifikasi sumber daya internal dan eksternal, 2) mengorganisasikan sumber daya serta membagikan peran dan tanggung jawab, 3) mengimplementasikan serta melakukan monitoring terhadap sub sistem pendidikan karakter di sekolah. Sekolah umumnya memiliki keterbatasan dalam menerapkan sistem manajemen pendidikan karakter sebagai suatu sistem yang memiliki rencana, organisasi, implementasi serta evaluasi yang jelas. Setiap indikator untuk mengukur efektivitas dan efisiensi praktik manajemen pendidikan seharusnya dirumuskan secara jelas agar terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan.

Salah satu praktik pendidikan karakter yang memiliki jaminan kualitas adalah di sekolah

Tzu Chi. Sekolah memiliki struktur organisasi yang menempatkan penjamin internal pendidikan karakter. Tugas dan fungsinya adalah sebagai perencana, pengorganisasi, implmentasi serta monev pendidikan karakter. Keberadaan sistem penjamin mutu internal pendidikan karakter memberikan proses yang lebih bermutu dalam pembelajaran. Proses pendidikan karakter tersebut direncanakan, diorganisasikan, diimplentasikan dan dievaluasi oleh sistem penjamin mutu pendidikan karakter yang dimiliki oleh sekolah.

Berbeda dengan SD Mutiara Bangsa. Praktik-praktik pendidikan karakter belum didukung oleh ketersediaan jaminan sumber daya. Interaksi dan gambaran terperinci kegiatan belum didokumentasikan. Belum ada struktur dalam organisasi sekolah yang bertanggung jawab terhadap implementasi pendidikan karakter. Hal ini menyebabkan praktik dalam pengelolaan pendidikan karakter serta kebijakan di sekolah sulit dimonitoring keberhasilan, efisiensi dan efektivitasnya. Di sekolah tersebut tidak ada pertanggungjawaban pengelolaan secara struktural tentang pendidikan karakter maupun pengembangan konsep penjaminan mutu internal pendidikan karakter. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karakter karena faktor norma dan budaya toleransi yang dimiliki oleh sekolah serta doktrinisasi yang kuat terhadap para siswa tentang keanekaragaman dan toleransi.

SDN 07 Jelambar telah melaksanakan praktik-praktik pendidikan karakter melalui kegiatan bersifat religius dan berhasil mendorong meningkatnya pengetahuan, kesadaran serta perilaku berkarakter para siswa. Tidak ada sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembagian tugas serta koordinasi dalam penjaminan mutu kurang terstruktur. SDN 07 Jelambar tidak memiliki jaminan bahwa SDM maupun anggaran untuk pendidikan karakter tersedia. Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk penyelenggaraan pendidikan karakter. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pada kebijakan, perencanaan, program maupun identifikasi hambatan belum tersedia. Secara formal, sistem penjaminan mutu dalam pendidikan karakter belum tersedia.

Penelitian mengenai sistem pendidikan karakter sangat penting dilakukan terutama pada level sekolah. Hasil penelitian yaitu referensi maupun konsep aplikatif pada level sistem yang dapat diimplementasikan dalam upaya membangun sistem pendidikan karakter yang bermutu. Analisis dan sintesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan rasional dan empirik tentang praktik-praktik sistem pendidikan

karakter. Analisis sistem dalam perspektif kritis digunakan untuk mengurai permasalahan dalam implementasi sistem dan kebijakan manajemen pendidikan karakter. Melalui penelitian ini diperoleh konsep aplikatif untuk membangun sistem mutu dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Penelitian tentang pendidikan karakter lebih banyak fokus pada proses pembelajaran pendidikan karakter bukan pada sistem mutu internal. Penelitian tentang sistem yang menggambarkan dokumentasi interaksi dan proses kegiatan, telaah mengenai jaminan sumber daya, analisis proses maupun dokumen untuk menjamin bahwa kebijakan, perencanaan, implementasi

serta program serta dokumentasi hambatan masih terbatas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis:

1. Kebijakan pendidikan karakter di SD Tzu Chi, SD Mutiara Bangsa dan SDN 07 Jelambar.
2. Program dan Implementasi pendidikan karakter di SD Tzu Chi, SD Mutiara Bangsa dan SDN 07 Jelambar.
3. Permasalahan dalam pendidikan karakter di SD Tzu Chi, SD Mutiara Bangsa dan SDN 07 Jelambar.
4. Jaminan Mutu pendidikan karakter di SD Tzu Chi, SD Mutiara Bangsa dan SDN 07 Jelambar

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif untuk memahami fenomena tentang kebijakan kepala sekolah pendidikan karakter, program dan implementasi pendidikan pendidikan karakter, permasalahan dalam pendidikan karakter serta jaminan mutu pendidikan karakter di setiap sekolah yang menjadi objek penelitian. Pendekatan kualitatif yang dipilih adalah studi kasus. Penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk generalisasi.

Lokasi penelitian adalah SD Tzu Chi, SD Mutiara Bangsa dan SDN 07 Jelambar. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada alasan fenomena permasalahan tentang analisis implementasi kebijakan dan sistem dalam pengelolaan pendidikan karakter di SD. Sumber

data penelitian dipilih berdasarkan pengalaman serta pengetahuan informan/terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan karakter yaitu 1) kepala sekolah, 2) wakil kepala sekolah, 3) Guru pendidikan kewarganegaraan, 4) Para guru. Teknik pengambilan partisipan sebagai sumber data menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Teknik untuk menentukan sumber data adalah teknik *snowball*. Teknik pengumpulan informasi (data) yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, 3) dokumen, alat-alat *audiovisual* sebagai alat bantu pengumpulan data. Prosedur analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, *display* data, validasi data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data menggunakan teknik data spiral.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Kebijakan pendidikan Karakter

Visi sekolah di SD Tzu Chi merupakan gambaran peran lembaga di masa depan dan wujud komitmen bersama. Visi sekolah bersumber pada tiga hal yaitu lingkungan global, ajaran *master* Cheng Yen, tujuan pendidikan nasional. Rumusan visi dan misi menggambarkan peran sekolah dalam situasi global. Visi SD Mutiara Bangsa disusun sederhana, jelas serta mencerminkan kondisi empirik sekolah dan karakter sekolah mudah dipahami. Para guru terbiasa dengan kondisi keanekaragaman. dan mendorong keterlibatan karena lebih realistis. Visi di SDN 07 Jelambar menekankan pada aspek-aspek moralitas dan religius. Hal ini disebabkan adanya dinamika lingkungan serta perubahan pada masyarakat urban yang cukup beragam mulai dari kebudayaan maupun latar belakang status sosial ekonomi para peserta didik.

Perumusan masalah dalam kebijakan pendidikan karakter di SD Tzu Chi melibatkan pihak internal dan perwakilan orang tua yang menjadi sukarelawan atau bersedia membantu penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Penetapan kebijakan dalam pendidikan karakter disesuaikan dengan visi dan misi, pihak yayasan dan kantor pusat telah merancang sistem pengelolaan sekolah dan rambu-rambu dalam kebijakan pendidikan karakter. Alternatif kebijakan pendidikan karakter disusun secara sederhana berdasarkan skala prioritas, analisis relevansi dengan kegiatan utama yaitu pendidikan karakter yang mencerminkan identitas sebagai peserta didik yang memiliki pemahaman, sikap hidup dan perilaku seperti ajaran *master* Cheng yen yang berwawasan global. Kegiatan sebagai realisasi kebijakan pendidikan karakter cukup beragam antara lain kegiatan rutin, spontan, dan

keteladanan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari peran guru serta sistem yang mendorong motivasi serta komitmen guru. Sumber daya yang tersedia menentukan bagaimana implementasi program pendidikan karakter.

Pemantauan hasil kebijakan tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru, serta orang tua yang menjadi relawan sekolah. Pemantauan hasil kebijakan kepala sekolah dilakukan oleh perwakilan dari kantor pusat terutama terkait dengan budaya humanis yang didoktrinkan, disosialisasikan kepada para peserta didik, guru maupun para orang tua. Pemantauan dilakukan terhadap tindakan atau perilaku guru dalam pelaksanaan kebijakan, respon guru terhadap kebijakan, dukungan orang tua, perilaku para peserta didik maupun dukungan kantor pusat terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan karakter ditujukan guna memperoleh perhatian khusus baik dari pihak kantor pusat, yayasan serta para orangtua dan didukung oleh sistem pendidikan karakter yang sudah mapan. Hasil evaluasi disampaikan secara nonformal kepada yayasan. Hasil formal evaluasi kepada kantor pusat dilakukan oleh tim unit jaminan mutu sebagai hasil audit.

Masalah-masalah dalam kebijakan pendidikan karakter di SD Mutiara Bangsa diidentifikasi dan dicari bersama melalui rapat formal yang diselenggarakan sekolah. Rapat melibatkan kepala sekolah, beberapa guru senior di lingkungan yayasan mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK dan pihak yayasan. Untuk kebijakan pendidikan masing-masing tingkat disusun berdasarkan hasil rapat bersama. Formula kebijakan dalam pendidikan karakter dirumuskan bersama antara kepala sekolah, guru senior. Perkiraan alternatif-alternatif kebijakan tidak dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode baik argumentasi rasional maupun berdasarkan teknik analisis tertentu dalam upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa pilihan kebijakan lebih baik dari yang lain (alasan pilihan rasionalitas). Estimasi hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sederhana yaitu dengan teknik *brainstorming* dan *forum discussion group*.

Kegiatan pendidikan karakter sebagai realisasi dari kebijakan pendidikan karakter antara lain memberikan pelajaran karakter di kelas sesuai dengan tema bulan dengan cara bercerita sebelum pelajaran dimulai, adanya perayaan hari besar agama, mendekorasi ruangan sesuai dengan hari-hari besar keagamaan dan ceramah keagamaan sebagai bentuk toleransi. Pada dasarnya setiap kegiatan ditujukan untuk mengembangkan

toleransi terhadap perbedaan agama dan saling menghormati. Kegiatan pendidikan karakter yang diselenggarakan di kelas tidak ada yang khusus, kecuali menempelkan tulisan-tulisan hasil karya siswa kelas satu dan dua digantungkan di dinding kelas atau bagi kelas anak besar, tema-tema bulan karakter disampaikan 15 menit sebelum pelajaran dimulai.

SD Mutiara bangsa tidak memiliki unit, tim kerja atau lembaga yang memantau bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam pendidikan karakter. Pemantauan hasil-hasil kebijakan pendidikan karakter dilakukan bersama-sama tetapi tidak secara formal didokumentasikan hasil pemantauan tersebut. Dari pemantauan yang dilakukan baik oleh guru, kepala sekolah di SD Mutiara Bangsa terhadap kinerja kebijakan pendidikan karakter antara lain relevansi pemantauan dengan kebijakan, pemantauan fokus pada tujuan yaitu peserta didik yang memiliki karakter, pemantauan fokus pada perubahan pasca implementasi kebijakan. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan sosial. Kepala sekolah, guru, pihak yayasan secara eksplisit melakukan pemantauan terhadap hubungan antara masukan, proses dan keluaran serta dampak dari kebijakan pendidikan karakter. Pemantauan dilakukan mulai dari awal sampai dengan diterimanya kebijakan oleh peserta didik (dirasakan oleh para peserta didik). Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan terhadap perubahan yang terjadi dengan adanya kebijakan seperti adanya bulan karakter, perayaan peristiwa keagamaan maupun pengembangan pada pengajaran dan pembelajaran untuk menanamkan rasa toleransi terhadap perbedaan dan keanekaragaman. Sifat evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun para guru terhadap kebijakan dalam pendidikan karakter fokus pada nilai kebijakan dan program.

Meskipun tidak secara formal dinyatakan dalam bentuk tertulis kriteria evaluasi terhadap kebijakan, pada dasarnya semua sepakat bahwa salah satu kriteria evaluasi kebijakan pendidikan karakter serta program yang diselenggarakan adalah efektivitas kebijakan memecahkan masalah-masalah pendidikan karakter. Kebijakan pendidikan karakter yang efektif dapat mempengaruhi pembentukan lulusan SD yang memiliki rasa toleransi tinggi terhadap keanekaragaman serta memiliki karakter.

Pendekatan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru dapat dikelompokkan berdasarkan asumsi yang mendasarinya yaitu ukuran manfaat atau nilai akan terbukti dengan sendirinya apabila kebijakan yang digulirkan sekolah efektif. Salah satu cara

untuk memastikan bagaimana kinerja kebijakan adalah dengan menggunakan pemeriksaan sosial dengan fokus pada kehidupan sosial di sekolah terutama bagaimana perilaku para peserta didik di sekolah serta bagaimana respon guru dalam melaksanakan kebijakan kepala sekolah. Evaluasi semu yang dilakukan oleh kepala sekolah cukup terbatas. Hal ini disebabkan adanya kesibukan serta kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Informasi hasil-hasil evaluasi kebijakan hanya disebar dan dikomunikasikan secara terbatas dalam bentuk lisan.

Pencarian Masalah (*problem solving search*) dilakukan secara bersama-sama dengan peran kepala sekolah yang dominan. Identifikasi dan pencarian masalah dilakukan agar kebijakan pendidikan karakter dapat berjalan secara efektif SDN 07 Jelambar. Estimasi adalah perkiraan-perkiraan yang disusun berdasarkan hasil perumusan masalah serta identifikasi kebutuhan para peserta didik. Estimasi formula kebijakan disusun berdasarkan informasi hasil perumusan masalah yang relevan.

Kegiatan pendukung sebagai realisasi dari kebijakan kepala sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan marawis. Pelaksanaan kebijakan mendapatkan pengawasan dan supervisi langsung dari sekolah. Kegiatan yang menjadi sarana untuk pendidikan karakter adalah kegiatan pramuka dan marawis serta *tauisyah* dengan mengundang ustad untuk memberikan ceramahnya secara rutin di sekolah. Di SDN 07 Jelambar tidak ada lembaga atau unit penjaminan mutu dalam pendidikan karakter. Setiap individu seperti guru atau kepala sekolah berperan sebagai penjamin pelaksanaan pendidikan karakter. Kepala sekolah menyatakan bahwa tidak ada lembaga khusus untuk menjamin pendidikan, guru dan kepala sekolah hanya mengoptimalkan kegiatan pramuka dan marawis yang diselenggarakan setelah jam pelajaran usai serta bantuan program gratis pendidikan karakter yang diselenggarakan di Cimacan. Kebijakan kepala sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran baik di kelas maupun di luar jam pelajaran mendapatkan respon positif baik dari guru maupun para orang tua.

Pemantauan hasil-hasil kebijakan tentang kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu kegiatan pendidikan karakter, *tauisyah* rutin maupun kegiatan perayaan keagamaan belum sepenuhnya dilakukan sebagai kegiatan formal yang didokumentasikan sebagai informasi tertulis untuk evaluasi kebijakan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dari aspek masukan anggaran masih lemah, sistem informasi belum

menjadi sumber daya yang dioptimalkan, sumber daya sosial seperti kemnitraan dan partisipasi masih perlu ditingkatkan. Pada level proses para guru telah menunjukkan kepatuhan dan proses sesesuai dengan tujuan meskipun perlu perbaikan terutama dari waktu pelaksanaan yang terhambat masalah seperti banjir. Penetapan tujuan dinilai rasional, spesifik dengan target waktu yang jelas.

Evaluasi dilakukan berdasarkan informasi hasil pemantauan yang dilakukan secara nonformal oleh kepala sekolah maupun guru Pembina. Seperti halnya sekolah lain yang melakukan evaluasi, kepala sekolah di SDN 07 Jelambar fokus pada evaluasi nilai yaitu bagaimana manfaat pendidikan yang dialami oleh para peserta didik dengan adanya kebijakan kepala sekolah dalam pendidikan karakter

Beberapa kriteria yang ditetapkan oleh sekolah untuk menggambarkan kinerja kebijakan kepala sekolah yaitu bagaimana efektivitas kebijakan serta efisiensi. Ditinjau dari aspek efektivitas kebijakan, baik kepala sekolah maupun guru menilai bahwa pencapaian saat ini cukup memuaskan seperti adanya peningkatan partisipasi peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan jumlah peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak yayasan, rutinitas *tauisyah* yang semakin baik. Hasil dari kebijakan tersebut yaitu menurunnya angka kenakalan peserta didik di sekolah. Tidak ada peserta didik yang dikembalikan kepada orang tua selama empat tahun terakhir yang disebabkan oleh kenakalan atau pelanggaran lain yang dianggap cukup berat misalnya tawuran. Ditinjau dari efisiensi alokasi sumber daya pelaksanaan kegiatan baik kepala sekolah maupun guru menilai usaha yang dilakukan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan pencapaian yaitu perubahan sikap dan perilaku siswa yang lebih berkarakter serta kondisi sekolah yang semakin kondusif.

Pendekatan yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam mengevaluasi hasil-hasil kebijakan cukup beragam. Kepala sekolah melakukan evaluasi semu terhadap kinerja kebijakan pendidikan karakter. Informasi hasil evaluasi kinerja kebijakan tidak disebar baik kepada instansi terkait maupun para orang tua. Kepala sekolah hanya mengkomunikasikan hasil-hasil evaluasi dengan para guru di sekolah. Tujuan penyebaran informasi adalah untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan komitmen dan tanggung jawab guru terhadap pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan bersama-sama.

## 2. Program dan Implementasi

Sekolah Tzu Chi adalah sekolah untuk kalangan menengah ke atas. Anggaran tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Salah satu kendala dalam SDM adalah kualitas kepribadian guru sebagai tenaga pendidik. Sekolah harus memastikan bahwa para peserta didik belajar bersama guru yang tepat dan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, untuk menjamin mutu guru, sekolah hanya menerima guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi terutama dalam soal bahasa dan pemahamannya tentang pendidikan. Implementasi program pendidikan karakter di Sekolah Tzu Chi, selain memiliki jam pelajaran khusus di setiap kelas setiap minggunya juga ada kegiatan yang sifatnya spontan dan hasil kreativitas guru

Keberhasilan program pendidikan karakter maupun kegiatan penunjang akan berhasil dengan adanya sumber daya yang memadai baik dari aspek anggaran, SDM, sistem, kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, kerjasama guru dengan unit penjaminan mutu. Salah satu sumber daya yang dioptimalkan oleh sekolah adalah kerjasama antara sekolah dengan orang tua

Struktur organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di SD Tzu Chi menunjukkan bahwa struktur organisasi lebih mapan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerangka kerja dalam struktur organisasi tersebut. Fungsi kepala sekolah, guru, koordinator budaya humanis, unit penjaminan mutu yang dibentuk dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan karakter kepada pusat secara jelas dinyatakan dalam struktur tersebut. Rencana kerja untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dan penekanan budaya humanis sesuai dengan ajaran *master* Cheng Yen. Pembagian tugas dan wewenang dalam implementasi kebijakan terutama pada program yang telah diagendakan seperti kegiatan pendidikan budaya humanis yang mencakup upacara minum teh, kelas merangkai bunga, kelas kaligrafi dan kelas pembelajaran kata perenungan *master* Cheng Yen.

Sistem informasi kebijakan diakui memang masih belum optimal digunakan sebagai upaya membangun kesepahaman dalam kebijakan. Segala hal yang menyangkut aspek-aspek internal dan eksternal yang berupa informasi dan data belum disajikan dalam sistem informasi tersebut. Sekolah dilengkapi dengan *wide area network* yaitu jaringan jaringan koneksi antar berbagai sekolah yang tergabung dalam yayasan serta pihak kantor pusat. Cabang-cabang sekolah di seluruh dunia yang mengajarkan ajaran *master* Cheng Yen memiliki jaringan di seluruh dunia.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah Mutiara Bangsa dipengaruhi oleh beragam faktor seperti SDM pengelola pendidikan karakter, pelaksana maupun dukungan sumber daya baik anggaran maupun keterlibatan orang tua. Anggaran untuk kebutuhan sekolah sudah disusun sebelum awal tahun ajaran baru. Usulan pengadaan anggaran atau perbaikan pada fasilitas belajar sudah termasuk pendidikan karakter diajukan pada tahun ajaran baru. Sampai saat ini, sekolah belum ada anggaran khusus untuk pendidikan karakter. Penyelenggaraan pendidikan seperti perayaan hari besar, bulan karakter yang diikuti dengan penyampaian cerita tentang karakter, pelatihan bagi guru dan staf belum memiliki sistem dokumentasi. Proses komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan karakter diantara guru dan kepala sekolah lebih bersifat nonformal. Dukungan fasilitas menurut kepala sekolah cukup memadai. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anggaran yang tersedia mencukupi kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

Proses penyelenggaraan pendidikan karakter tidak memerlukan prosedur yang rumit. Kepala sekolah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pihak yayasan melakukan pengawasan dari sisi anggaran walaupun tidak secara rutin dilakukan. Anggaran yang cukup besar hanya dari pelatihan yang diselenggarakan sekolah. Proses pengorganisasian pekerjaan sudah menjadi rutinitas. Pembagian kerja hanya dilakukan diantara para guru dan wali kelas. Guru bertanggung jawab terhadap kegiatannya masing-masing dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah secara lisan. Belum ada dukungan struktur organisasi yang menjelaskan tentang prosedur pertanggungjawaban, maupun pembagian tugas dan pekerjaan dalam pengelolaan pendidikan karakter.

Dukungan sistem informasi dalam kebijakan sebagai upaya untuk membangun kesepahaman mengenai kebijakan terutama pada tingkat operasional sangat diperlukan. Informasi tidak hanya diperlukan tetapi perlu dikendalikan. Dalam praktiknya sistem pengendalian informasi belum berjalan di SD Mutiara Bangsa. Belum ada dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang sistematis. Biasanya para guru memperoleh informasi dari rapat atau pertemuan di sekolah.

Anggaran di SDN 07 Jelambar untuk pengelolaan pendidikan karakter secara khusus belum ada. Sebagai sekolah negeri yang tidak memungut biaya alias gratis maka dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan utama tidak

memperoleh anggaran. Hal ini seperti dinyatakan oleh kepala sekolah bahwa sekolah tidak memungut biaya kepada para peserta didik termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Anggaran untuk pendidikan karakter seperti *tausiyah* dari kantong pribadi kepala sekolah. Untuk pelatihan di Cimacan peserta tidak dipungut biaya dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak yayasan. Sekolah memiliki 12 jumlah guru dan delapan diantaranya telah memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Guru yang ada di sekolah memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menghadapi siswa yang bermasalah.

Sekolah tidak memiliki persiapan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan karakter atau mengelola kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pramuka maupun marawis. Pada tahun ini, memang kegiatan marawis terus digalakkan karena para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut memiliki perangai yang baik. Para orang tua pada umumnya memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi perkembangan perilaku anak. Para guru bekerjasama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah-masalah anak seperti bolos atau tidak mengerjakan tugas secara berturut-turut.

Implementasi program pendidikan karakter akan berhasil dengan adanya dukungan SDM, Anggaran, sistem pengelolaan pendidikan karakter, dukungan struktur organisasi yang menggambarkan bagaimana pengorganisasian pekerjaan serta pembagiannya, sarana prasarana serta kondisi lingkungan yang kondusif. Penyelenggaraan kegiatan tidak didukung oleh ketersediaan sumber-sumber daya Keuangan, sistem, teknologi dan informasi. Sekolah hanya memiliki sumber daya seperti SDM dan kerjasama dengan pihak-pihak penyelenggara pendidikan karakter seperti yayasan. Sekolah memperoleh dukungan dari partisipasi masyarakat. Sekolah tidak memperoleh dukungan anggaran khusus dalam pelaksanaan program.

Hasil observasi dan studi dokumentasi diketahui bahwa untuk pelaksanaan sistem manajemen pendidikan karakter sekolah tidak memiliki struktur organisasi tersendiri atau terintegrasi dengan struktur yang ada dengan menambahkan tugas dan tanggung jawab individu dalam sistem manajemen karakter. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja secara struktural belum ada. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab hanya membagi pekerjaan antara guru pembina kegiatan dengan kepala sekolah sebagai pengawas. Tidak ada pembagian pekerjaan secara detail apalagi pembagian sumber daya. Guru pembina kegiatan ekstrakurikuler

memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan. Proses pertanggungjawaban belum dilakukan secara formal evaluasi setiap kegiatan disampaikan secara lisan oleh guru kepada kepala sekolah. Dokumen kegiatan hanya menunjukkan jumlah siswa yang ikut serta siapa pembinanya dan apa saja kegiatan yang diselenggarakan.

Dalam implementasi program pendidikan karakter belum ada dukungan struktur organisasi artinya 1) secara formal tidak ada pembagian kerja untuk mencapai tujuan, pembagian kerja dilakukan secara informal, 2) pengelompokan pekerjaan dilakukan secara sederhana dimana pekerjaan dikelompokkan sebagai pekerjaan pengelolaan dan pembinaan/pengawasan kegiatan. Fungsi pengelolaan dilakukan oleh guru dan fungsi pengawasan serta pembinaan dilakukan oleh kepala sekolah, 3) hubungan antar bagian yang menjelaskan rantai komando hanya dari kepala sekolah kepada guru termasuk pengelola kegiatan ekstrakurikuler serta tanggungjawab guru hanya kepada kepala sekolah, 4) Koordinasi setelah pekerjaan dibagikan dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter agar tujuan tercapai.

### **3. Permasalahan dalam Sistem Pendidikan Karakter**

Di SD Tzu Chi, anggaran, SDM serta sistem tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Dukungan orang tua siswa cukup tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar. Sistem informasi digunakan untuk komunikasi antar cabang sekolah-sekolah Tzu Chi di seluruh dunia, berbagi pengalaman praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan karakter terbaik, pemecahan masalah serta bagaimana guru mengedukasi dan melakukan *self assessment* untuk perbaikan. Implementasi dan dukungan sistem informasi terus dilakukan oleh sekolah. Di sekolah Tzu Chi, fungsi riset dan pengembangan masih terbatas sebagai referensi bagi guru untuk memperbaiki praktik. Mengenai pendidikan karakter, riset dan pengembangan pendidikan karakter dalam perspektif ilmu pengetahuan belum banyak dilakukan.

Keterbatasan kualitas SDM dalam melakukan riset tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah lain. SD Mutiara Bangsa adalah salah satu sekolah yang memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Belum ada riset-riset yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah tersebut. Orientasi riset belum mendukung

pengembangan praktik-praktik pendidikan karakter di sekolah

Anggaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh SDN 07 Jelambar. Lemahnya dukungan anggaran tidak serta merta membuat pelaksanaan pendidikan karakter terhambat. Hal ini seperti disampaikan oleh salah satu guru bahwa proses belajar karakter bisa dikreasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan pelaksanaannya memang butuh komitmen. Sekolah sebenarnya mengalami kesulitan anggaran dalam pelaksanaan upaya-upaya pengembangan pendidikan karakter karena tidak ada alokasi khusus yang disusun.

Di SDN 07 Jelambar, sistem informasi belum berjalan. Sekolah selama ini hanya mengandalkan data-data seperti jumlah kenakalan peserta, jumlah peserta didik, hasil analisis terhadap kondisi lingkungan, jumlah guru, data mengenai sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Belum ada pengelolaan data-data yang ditujukan untuk kepentingan perencanaan sistem manajemen pendidikan karakter. Pertimbangan seperti sumber data yang relevan, bagian yang bertugas dan mengolah data, teknologi atau alat bantu proses pengolahan data menjadi informasi belum menjadi perhatian sekolah. Untuk riset dan pengembangannya memang tidak banyak dilakukan oleh para guru. Sebagian besar PTK yang dilakukan oleh guru belum ditujukan untuk perbaikan pada praktik-praktik pendidikan karakter di sekolah. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas SDM /Guru yang mampu melakukan penelitian tentang pendidikan karakter.

#### **4. Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Pendidikan Karakter**

Berdasarkan hasil studi dokumentasi mengenai program-program pendidikan serta agenda pendidikan SD Tzu Chi diketahui bahwa program berubah setiap tahun. Keputusan usulan program berada di kepala sekolah dan keputusan program ada di pihak kantor pusat. Selama ini, sepanjang kegiatan atau program memiliki argumentasi relevansi dengan pendidikan karakter dan sebagai bagian dari berkembangnya budaya humanis, program tersebut disetujui. Dilihat dari jumlah dan tujuan, program pada tahun 2015 lebih spesifik dan tujuan lebih jelas (*Clarity Program*), mendorong keterlibatan orang tua dan program lebih variatif. Pengembangan program diikuti dengan pengembangan penjaminan mutu oleh tim penjamin mutu sekolah. Sekolah mengembangkan kualitas program dari mulai *input* seperti anggaran, dukungan orang tua maupun pihak yayasan, perhatian dan motivasi para siswa. Sekolah mengembangkan kualitas pada proses

pelaksanaan kegiatan seperti kualitas dalam pengorganisasian program, peningkatan komitmen partisipasi aktif guru dalam proses, peningkatan ketertarikan dan keterlibatan siswa serta bagaimana orang tua terlibat dalam proses tersebut.

Penjamin mutu didatangkan langsung dari kantor pusat di Taiwan dan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk penjaminan mutu. Unit penjamin mutu bertanggungjawab kepada kantor pusat dan merupakan unit penjamin mutu untuk cabang Jakarta. Unit penjamin mutu terdiri dari SDM yang sangat memahami bagaimana mutu dan ajaran *master* Cheng Yen. Koordinasi dan komunikasi antara pengambil kebijakan dengan unit penjamin mutu dilakukan secara formal. Hasil *audit* disampaikan kepada kepala sekolah untuk tindakan korektif dan untuk temuan-temuan yang bersifat prinsip dan dapat menghambat proses penyelenggaraan pendidikan biasanya dikonsultasikan dengan kantor pusat dan yayasan untuk tindakan selanjutnya. Unit penjamin mutu di sekolah Tzu Chi memiliki fungsi dan wewenang untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan karakter tetap berada pada tujuannya serta berada pada batas toleransi kriteria yang telah ditetapkan serta mengajukan rekomendasi untuk tindakan korektif. Unit penjamin mutu merumuskan konsep penjaminan mutu pendidikan karakter, perbaikan serta menjamin bahwa setiap kegiatan memiliki standar mutu yang telah ditetapkan. Unit penjaminan mutu adalah institusi fungsional yang bertugas untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter di sekolah dalam memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan. Unit penjaminan mutu di SD Tzu Chi memiliki tugas membantu kepala sekolah mengembangkan konsep penjaminan mutu serta sistem dokumentasi kegiatan pendidikan karakter baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Unit penjamin mutu mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan sistem penjaminan mutu pendidikan karakter serta melaporkan kegiatan tersebut kepada kantor pusat secara berkala.

Unit penjamin mutu pendidikan karakter menggunakan hasil *audit* internal penyelenggaraan pendidikan karakter untuk menerapkan sistem kewaspadaan lebih awal serta memberikan supervisi dan pelatihan yang terkait dengan penjaminan mutu terhadap para guru dan staf. Kegiatan dan program yang terkait dengan pendidikan karakter menjadi tugas unit penjaminan mutu di sekolah.

Di SD Mutiara bangsa maupun SDN 07 Jelambar tidak ada unit penjaminan mutu internal yang dilakukan. Penjaminan mutu hanya mengacu pada standar mutu lulusan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. SD Mutiara Bangsa maupun SDN 07 Jelambar tidak memiliki sistem penjaminan mutu internal secara formal. Guru, kepala sekolah, para staf serta kredibilitas sekolah adalah variabel yang menjamin bahwa sekolah memiliki karakteristik yang berbeda terutama dari aspek pendidikan karakter yang sangat toleran terhadap keanekaragaman. Persyaratan umum dan

persyaratan dokumentasi yang menggambarkan pernyataan tentang kebijakan mutu dalam pendidikan karakter belum didukung oleh panduan kualitas, prosedur tertulis dalam penyelenggaraan pendidikan karakter maupun dokumen-dokumen yang diperlukan guna menjamin mutu. Dokumen yang menyatakan hasil pendidikan karakter masih bersifat umum.

## PEMBAHASAN

Visi adalah gambaran peran lembaga atau organisasi di masa depan. Ditinjau dari visi dan misi sekolah ketiga sekolah tersebut merumuskan visi dengan tepat. Visi tersebut menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan pendidikan karakter. Visi SD Mutiara Bangsa adalah menciptakan siswa yang cerdas, kreatif, mandiri dan bijaksana. Visi SDN Jelambar 07 adalah jujur, disiplin, bertakwa dan berprestasi sedangkan Visi SD Tzu Chi adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil dan berwawasan global. Persamaan ketiga visi tersebut adalah tentang bagaimana peran lembaga untuk menghasilkan para peserta didik dan bagaimana kegiatan untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan harapan. Visi dan misi identitas sekolah dan pemahamannya tentang masa depan. Sebagai sebuah sistem sosial yang terbuka, sekolah Tzu Chi dipandang lebih siap untuk menghadapi globalisasi atau era masyarakat bebas ASEAN artinya visi yang dinyatakan lebih visioner.

Pernyataan visi dari ketiga sekolah tersebut tampak jelas menunjukkan bagaimana karakteristik lembaga. Visi cukup jelas dan mudah dipahami. Pernyataan visi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Blanchard dan Stoner (2004, hlm 21) bahwa visi yang jelas merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga. Pernyataan visi akan berimplikasi pada sistem tata kelola pencapaian tujuan serta bagaimana perilaku anggota organisasi diarahkan. Pernyataan visi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sallis (2005, hlm.119) bahwa visi akan mengarahkan lembaga dan memberikan makna apa peran yang diinginkan oleh lembaga di masa depan. Ditinjau dari peran lembaga, dalam visi dari tiga SD tersebut tidak secara eksplisit menyatakan peran lembaga. Namun ditinjau dari tujuan keberadaan lembaga, visi sekolah cukup jelas yaitu menghasilkan peserta didik yang sesuai harapan. Fokus dari visi tersebut adalah peserta didik.

Proses kebijakan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pendidikan karakter salah satu faktor utama dalam perumusan kebijakan adalah identifikasi masalah-masalah dalam fokus

kebijakan antara lain masalah sub sistem pendukung kebijakan yaitu 1) belum ada tim kerja yang bertugas merumuskan kebijakan, 2) belum adanya lembaga atau sistem yang menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Paudel (2009, hlm.39) yang menjelaskan bahwa dua faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah kapasitas dan kemauan politik yang tertuang dalam kebijakan untuk memecahkan masalah. Kapasitas dapat dilihat dari kemampuan untuk melaksanakan tahapan dalam perumusan kebijakan dan kemauan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah merupakan implikasi dari adanya kebijakan kepala sekolah untuk mewujudkan proses pendidikan karakter yang efektif. Keberhasilan kegiatan sebagai realisasi kebijakan pendidikan karakter tidak terlepas dari adanya kemauan politik serta kapasitas untuk merealisasikan kebijakan. Kegiatan disusun berdasarkan hasil identifikasi internal dan eksternal sekolah termasuk bagaimana dukungan para orang tua terhadap program-program yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada para peserta didik. Kegiatan tersebut memerlukan dukungan anggaran maupun sumber daya sosial yang diperlukan untuk mendukung pengorganisasian dan pembagian kerja.

Salah satu faktor penting yang mendukung sekaligus menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter adalah budaya. Budaya dapat menghambat sekaligus dapat mendorong meningkatnya komitmen serta membangun kemantapan sistem sosial dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Sub budaya pada masing-masing unit kerja baik di tingkat kelas enam atau satu berbeda. Sub budaya yang berbeda antar tingkatan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dapat menghambat bagaimana sebuah kegiatan dilaksanakan. Sekolah perlu mengoptimalkan bagaimana ide, keyakinan atau pemikiran bersama tumbuh dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Kesamaan ide pendapat atau pemikiran dalam

menyelenggarakan program yang menunjang kegiatan memberikan rasa mantap secara sosial baik individu dalam organisasi.

Lemahnya riset dan pengembangan konsep-konsep pendidikan karakter di sekolah menjadikan praktik-praktik sulit berkembang. Hasil riset dan pengembangan konsep-konsep tentang pendidikan karakter di ketiga sekolah tersebut belum optimal. Kondisi tersebut menghambat perkembangan pada praktik-praktik pendidikan karakter di sekolah. Guru jarang melakukan refleksi kritis baik terhadap pencapaian pendidikan karakter maupun terhadap proses dengan cara karya ilmiah. Keterbatasan guru dalam memahami konsep-konsep dalam pendidikan karakter atau lemahnya pemahaman model-model pengembangan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan karakter akan menghambat perkembangan praktik. Riset yang terarah dan dikembangkan baik oleh sekolah maupun atas inisiatif guru akan mendorong meningkatnya pemahaman guru tentang bagaimana pendidikan karakter maupun penyelenggaraannya. Pentingnya riset dan pengembangan dinyatakan oleh Berkowitz dan Bustamante (2013, hlm.7) bahwa para pendidik dan pengambil keputusan harus memahami teori dan memiliki akses terhadap sumber-sumber ilmu yang berkaitan dengan pengembangan dan pembelajaran siswa termasuk dalam pendidikan karakter. Hasil-hasil riset dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pendidikan karakter di sekolah dan dampaknya terhadap keberhasilan pendidikan karakter.

Sistem informasi perlu dioptimalkan oleh sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Fungsi sistem informasi dapat digunakan untuk mendorong riset dan pengembangan. Kemudahan guru dalam mengakses sumber-sumber belajar dapat memberikan motivasi dan kesempatan lebih luas bagi guru untuk mengembangkan kemampuannya baik dalam hal teori maupun praktik-praktik pendidikan karakter terbaik serta melakukan *benchmarking*. Informasi yang tersedia di internet dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan praktik-praktik pendidikan karakter.

Perkembangan dan evolusi teknologi komunikasi telah mempermudah pengorganisasian sistem informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Proses pengiriman informasi yang cepat termasuk dalam dunia pendidikan dapat dilakukan hanya dengan menyusun sistem jaringan lokal (*local area network*) atau memperoleh informasi dengan mengakses internet. Informasi yang mudah diakses dan bermutu merupakan sarana untuk mendukung

struktur kelembagaan dalam menjamin sistem mutu. Informasi tentang mutu dalam penyelenggaraan pendidikan karakter serta dokumentasi praktik-praktik pendidikan karakter terbaik dapat dikumpulkan, disimpan, diolah dan dipertukarkan informasi sehingga memungkinkan untuk terjadinya persamaan persepsi dan atau tindakan yang sesuai dengan tujuan untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bermutu.

Sistem jaminan mutu dalam pendidikan karakter merupakan sistem yang disusun dari dalil-dalil sebagai rangkaian yang terpadu dalam sistem pendidikan karakter. Jaminan mutu pendidikan karakter sesuai dengan hasil penelitian mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter seperti dapat dilihat dari praktik penjaminan mutu di sekolah Tzu Chi.

Pentingnya suatu standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan karakter telah dinyatakan oleh para ahli termasuk Williams (2010) yang menegaskan bahwa perlunya suatu standar kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang terintegrasi. Standar tersebut antara lain nilai dan karakter yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan dan menunjukkan seberapa baik kah nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Artinya bahwa sekolah memiliki landasan nilai yang disepakati bersama dan berfungsi sebagai penjamin mutu dalam kegiatan pendidikan karakter

Keberadaan Sistem penjaminan mutu internal akan mengarahkan perbaikan secara berkelanjutan baik secara organisasi maupun individu. Lembaga akan terarah dalam melakukan evaluasi diri dan refleksi terhadap kualitas pada penyelenggaraan pendidikan karakter. Fungsi dari penjaminan mutu yang disampaikan Yonezawa (2002) masih relevan dengan kondisi saat ini, bahwa keberadaan sistem penjaminan mutu akan mengarahkan keberhasilan untuk bersaing di tengah kompetisi global termasuk dalam pendidikan. Keberadaan sistem penjaminan mutu akan memastikan terjadinya penilaian diri dan refleksi sebagai kegiatan untuk melakukan perbaikan pada setiap pencapaian mutu. Sistem penjaminan mutu akan meningkatkan keterlibatan anggota organisasi, partisipasi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar pendidikan karakter bermutu.

Keberadaan sistem penjamin mutu memberikan dampak positif seperti ditemukan di SD Tzu Chi. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Pitt (2014, hlm 3) bahwa: *'its purpose is a desire to support management to improve operational, and ultimately organizational,*

*outcomes*”. Tujuan dari adanya sistem penjaminan mutu adalah memastikan bahwa setiap proses sesuai dengan standar dan tujuan. Hal yang sama disampaikan oleh Purushothama (2010, hlm 59) bahwa sistem penjamin mutu internal sebagai sebuah proses untuk memastikan kesesuaian spesifikasi dengan kualitas standar. Ketiadaan sistem penjaminan mutu yang dibuktikan dengan adanya lembaga penjamin, SDM, produk seperti manual mutu yang berisi konsep mutu mengurangi kualitas pada pencapaian tujuan. Sistem mutu diadakan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai dengan harapan para pelanggannya. Kondisi dan realita dalam penyelenggaraan pendidikan karakter kontra produktif dengan harapan. Hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

Jaminan mutu sebagai sistem mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan serta bagaimana pengorganisasian program-program atau kegiatan dalam pendidikan karakter. Setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter memiliki standar mutu. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dirumuskan dalil tentang jaminan mutu pendidikan karakter adalah semakin tinggi jaminan mutu dalam pendidikan karakter maka semakin tinggi tingkat kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Tanpa adanya sistem penjaminan mutu secara internal maka sulit untuk menyatakan bahwa sekolah memiliki kegiatan-kegiatan pendidikan karakter yang terukur dan memiliki mutu. Hal ini seperti

disampaikan Ng (2007, hlm.237) yang menjelaskan penjaminan mutu terkait dengan akuntabilitas, standar kinerja dan sekolah.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karakter seperti dinyatakan oleh Bahm (2012, hlm.7) tidak hanya dapat dilihat dari adanya keterlibatan sekolah namun seluruh *stakeholder* sekolah. Artinya pendidikan karakter yang terjamin adalah pada saat sistem pendidikan tersebut melibatkan seluruh *stakeholder* dalam mempersiapkan sebuah proses yang sistematis dan terencana. Keterlibatan tersebut akan terwujud dengan adanya sistem yang menjaminkannya yang dihasilkan dari keterlibatan para *stakeholder*. Hal yang sama disampaikan oleh Berkowit dan Bustamante (2013, hlm 9) yang memberikan gambaran tentang model pendidikan karakter yang disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik yaitu model PRIME. Salah satu elemen inti dalam model tersebut yaitu adanya perkembangan positif hubungan baik diantara para *stakeholder*. Hubungan tersebut mengarah pada keterlibatan penuh dan komitmen untuk mendukung keberadaan pendidikan karakter. Keberhasilan sekolah menyediakan sistem yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pelanggan terhadap pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Reichenbacher dan Einax (2011, hlm.2) menjelaskan bahwa penjaminan mutu meliputi seluruh kegiatan yang difokuskan pada pemenuhan mutu sesuai dengan kebutuhan yang memberikan rasa puas. Guna memberikan kepuasan maka diperlukan dukungan dan keterlibatan dalam perancangan sistem penjaminan mutu internal dalam pendidikan karakter.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setiap sekolah memiliki perbedaan karakter khas yang dinyatakan di dalam visinya. Pernyataan visi baik yang lebih menggambarkan sisi religius, nasional dengan keanekaragaman maupun dengan nilai-nilai universalnya mempengaruhi bagaimana praktik-praktik dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Perumusan visi dilakukan tanpa melibatkan pihak eksternal seperti komite sekolah atau para orangtua. Visi dirumuskan berdasarkan karakteristik sekolah serta menampilkan ciri-ciri khas karakter yang ingin diwujudkan melalui peserta didik yang lulus dari sekolah tersebut.

Masalah-masalah dalam pendidikan karakter serta kebutuhan peserta didik terhadap pendidikan karakter menjadi dasar untuk merumuskan formula kebijakan pendidikan karakter. Estimasi dan seleksi kebijakan dilakukan

secara terbatas dengan keterlibatan guru serta kepala sekolah. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan melalui rapat terbatas serta diskusi adalah kebijakan yang memiliki relevansi dengan upaya mendidik siswa sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi karakteristik sekolah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah tentang kebijakan mutu lebih bersifat operasional atau fokus pada aspek-aspek yang dapat menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan karakter. Pemantauan kinerja kebijakan dilakukan melalui pemeriksaan sosial terutama respon guru serta perubahan perilaku siswa.

Program dan pelaksanaan pendidikan karakter disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan karakteristik khas yang melekat pada sekolah tersebut. Program-program dan implementasi

pendidikan karakter untuk sekolah yang belum memiliki sistem penjamin mutu lebih bersifat non formal, tidak ada standar yang dibuat dalam pendidikan karakter dan belum terstruktur.

Kendala utama yang dihadapi oleh sekolah dalam pendidikan karakter adalah lemahnya sistem penjaminan mutu pendidikan karakter, lemahnya dukungan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter berkualitas. Anggaran yang terbatas serta belum berfungsinya budaya mutu sebagai pembeda sekolah yang fokus dengan pendidikan karakter dengan sekolah yang tidak memiliki orientasi pada pendidikan karakter.

Sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan karakter masih bersifat informal kecuali sekolah SD Tzu Chi. Sekolah belum memiliki sistem penjaminan mutu dalam pendidikan karakter. Kondisi ini menyebabkan proses penyelenggaraan program pendidikan karakter lebih bersifat rutinitas tanpa adanya evaluasi dan pengendalian melalui sistem. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah memerlukan kebijakan dan dukungan sistem penjaminan mutu yang dapat memberikan kepastian bahwa setiap program, penyelenggaraan pendidikan dilangsungkan dengan standar mutu sesuai dengan visi dan misi sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahm, K.L (2012). *The Integration Of Character Education And Its Impact On teachers' professional practice*. University of Missouri-st. Louis. Dissertation
- Berkowitz, M.W. dan Bustamante, A (2013). *Using research to set priorities for character education in schools: A global perspective*. KJEP Special Issue (2013) hlm. 7
- Blanchard, K dan Stoner, J (2004). *The Vision Thing: Without It You'll Never Be a World-Class Organization. Leader to Leader*. 2 (2) hlm. 21-28
- Budimansyah, Dasim (2010). *Pendidikan Karakter*, Bandung. Alfabeta
- Cha. S.H. (2013). *Restructuring the concept of character education and policy in Korea. KJEP Special Issue*. hlm. 51-63
- Dunn, WN (2005). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta.
- Huet et al (2011). *Linking a Research Dimension to an Internal Quality Assurance System to Enhance Teaching and Learning in Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences* 29 947 – 956
- Megawangi (2004). *Pendidikan karakter*. Jakarta. Yayasan Obor
- Koeseome. D. (2011). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Kanisius
- Lickona (2000). *Talks About Character Education. Scholastic Early Childhood Today. ProQuest Research Library* 14 (7)
- Lumby, J (2011). *Enjoyment and learning: policy and secondary school learners' experience in England. British Educational Research Journal* 37 (2) hlm. 247–264
- Materu, P, N (2007). *Status, Challenges, Opportunities, and Promising Practices*. Washington DC. World Bank Working paper no. 124
- Ng. P.T. (2007). *Quality assurance in the Singapore education system in an era of diversity and innovation. Educ Res Policy Prac*, 2 (6) hlm. 235–247.
- Paudel, N.R (2009). *A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration. Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, 25 (2) 36-54
- Pitt, S.A (2014). *Internal Audit Quality Developing a Quality Assurance and Improvement Program*. New Jersey. Wiley
- Purushotama, B (2010). *Effective implementation of quality management systems*. India. Woodhead Publishing
- Reichenbacher, M dan Einax, J., W (2011). *Challenges in Analytical Quality Assurance*. NY: Springer
- Sallis E. (2005). *Total Quality Management in Education*. UK: Kogan Page.
- Saghafi, A. dan Shatalebi, B. (2012). *Analyzing The Role Of Teachers In The Nature Character Education Of Students From The Attitudes Of Them. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)* 1(7) hlm 54-59
- Skyes, G et al. Penyunting (2009). *Handbook of Education Policy Research*. NY. Routledge.

Watzh, M.,H (2010). An Assessment Of Character Education In New York State. A Dissertation. D'Youville College

Wildi et al (2002). The International Study Leadership in Education. *Journal of education Administration*.42 (4) hlm 416-430

Williams H.,R.,S (2010). Widening the Lens to Teach Character Education Alongside Standards Curriculum. *The Clearing House*, 83 (4) : hlm 115–120

Yonezawa,A (2002). The quality assurance system and market forces in Japanese higher education. *Higher Education* 43: 127–139